

# TESIS

**PEMBERHENTIAN NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS  
DI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata-2  
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana  
Universitas Andalas*



OLEH :

**RIA INDRIANA**  
**1520123080**

PEMBIMBING :

1. Dr. AZMI FENDRI, S.H., M.Kn.
2. Dr. JEAN ELVARDI, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

**TERMINATING NOTARIES IN CONNECTION WITH CRIMINAL  
ACTIONS MADE BY NOTARIS  
IN PADANG CITY**

(Ria Indriana, 1520123080, Master Program of Notary of Law Faculty of Andalas  
University of Padang, 102 pages)

**ABSTRACT**

Notary Public Officer is authorized to make an authentic deed of all acts, agreements and statutes required by law or by an interested party to be declared in an authentic deed, guaranteeing the date of making the deed, preserving the deed, granting the copy, the copy and quotations of deeds, all of which during the making of the deeds are not also assigned or excluded to other officials or other persons established by law. If the Notary in performing his duties deviates from what has been determined by the Act, then the Notary is certainly may be dismissed from his position as Notary. The act of law is an act that has legal consequences. Notary who commits an act unlawfully in making authentic deed must be responsible for his / her actions. This problem has resulted in the formulation of the problem: 1) The Basic Consideration of MPD, MPW and MPP in Providing Recommendation of Termination to Notary in relation to Criminal Act Conducted by Notary? 2) How is the process of dismissing Notary in relation to criminal acts committed by Notary? The research method used is empirical juridical, analytical descriptive with the object of study covering the principles of law, the effectiveness of law in Society. The main sources of data in this study are the results of interviews, the law of position Notary and the implementation in the community. Assessment techniques and collection of legal materials using document studies and interviews. From the results of the study and discussion it is concluded that the basis of consideration by the Supervisory Board in dismissal of the Notary in relation to the Criminal Act is articles 9 and 13 of UUJN which the Notary can be suspended and dismissed with disrespect based on the incremental court ruling. Regarding the process of dismissal of a Notary related to a criminal case under the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.PR.08.10 of 2004 Regarding the procedures for the appointment of members, dismissal of members, organizational structure, procedures and procedures of examination of the Notary Supervisory Board, The notary is graded from the MPD to MPW, MPW to MPP and MPP to the Minister. oversight of the performance of a Notary undertaken by the Supervisory Board should be further enhanced as it affects the moral aspect of the Notary's own position in society in general. Notaris may refuse to make deed if the information or formal data submitted by the tanger is against the rule of law

Keywords: Dismissal, Notary Public, Crime.

**PEMBERHENTIAN NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS  
DI KOTA PADANG**

(Ria Indriana, 1520123080, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas  
Hukum Universitas Andalas Padang, 102 halaman)

**ABSTRAK**

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan glosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. jika Notaris dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Notaris tersebut tentu dapat diberhentikan dari jabatannya selaku Notaris. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat-akibat hukum. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1) Dasar Pertimbangan MPD, MPW dan MPP Dalam Memberikan Rekomendasi Pemberhentian Terhadap Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Notaris? 2) Bagaimanakah proses pemberhentian Notaris sehubungan dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, undang-undang jabatan Notaris dan penerapan ditengah masyarakat. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dasar pertimbangan oleh Majelis Pengawas dalam pemberhentian terhadap Notaris terkait Tindak Pidana adalah pasal 9 dan 13 UUJN yang mana Notaris tersebut dapat di berhentikan sementara dan diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkraht. Mengenai proses pemberhentian Notaris yang terkait kasus pidana berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang tatacara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organiasi, tata kerja dan tatacara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang mana proses pemberhentian Notaris tersebut diakukan secara berjenjang dari MPD ke MPW, MPW ke MPP dan MPP kepada Menteri. pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh Mejlis Pengawas harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum. Notaris dapat menolak untuk membuat akta jika keterangan atau data formal yang disampaikan oleh penghadap bertentangan dengan aturan hukum.

Kata Kunci : Pemberhentian, Notaris, Tindak Pidana.